

**PENGARUH *E-GOVERNMENT* TERHADAP TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN DAERAH**

(Studi kasus Kec. Wawo NTB BIMA)

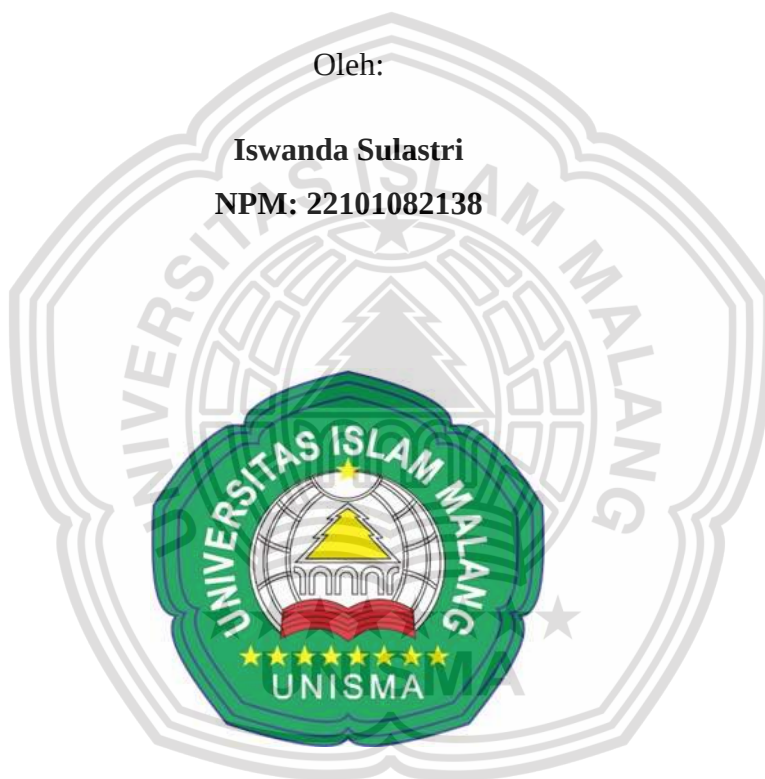
SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

Iswanda Sulastri

NPM: 22101082138



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2025

ABSTRACT

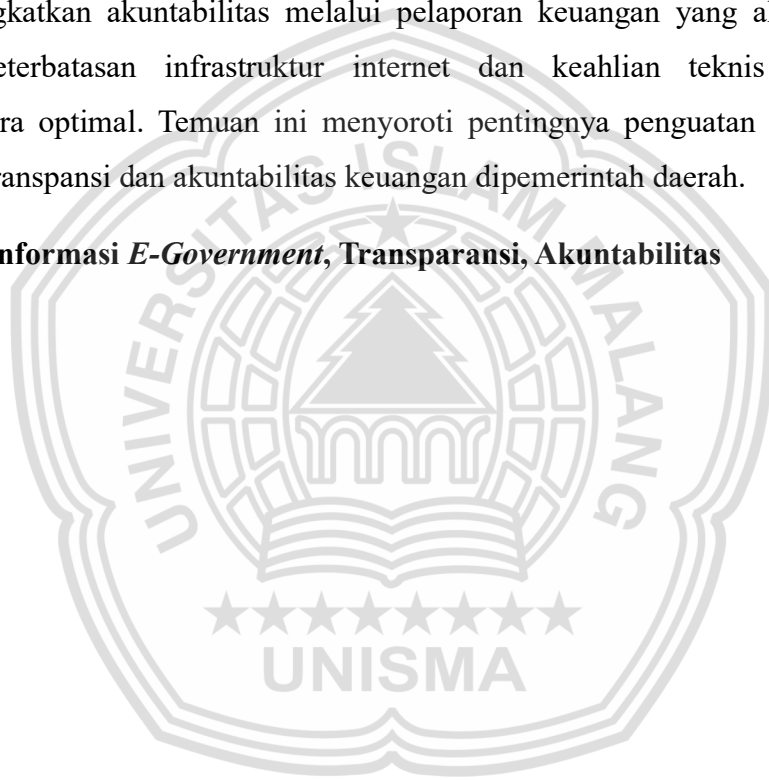
The rapid development of Information and Communication Technology (ICT) has significantly influenced governance in Indonesia, particularly through the implementation of E-Government. This study examines the impact of E-Government on transparency and accountability in public financial management at the regional government level, focusing on Wawo District, Bima, West Nusa Tenggara. Using a quantitative approach, data was collected from 40 civil servants through questionnaires and analyzed using descriptive statistics and simple linear regression. The results indicate that E-Government enhances transparency by providing open access to financial data and increases accountability through accurate financial reporting. However, challenges such as limited internet infrastructure and technical expertise hinder its optimal implementation. These findings highlight the importance of strengthening E-Government to improve.

Keywords : E-Government, Transparency, Accountability

ABSTRAK

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia, khususnya melalui penerapan *E-Government*. Penelitian ini mengkaji dampak *E-Government* terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di tingkat pemerintah daerah, dengan fokus pada Kecamatan Wawo, Bima, Nusa Tenggara Barat. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan dari 40 pegawai negeri sipil melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *E-Government* meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses terbuka terhadap data keuangan dan meningkatkan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan yang akurat. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur internet dan keahlian teknis menghambat implementasinya secara optimal. Temuan ini menyoroti pentingnya penguatan *E-Government* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dipemerintah daerah.

Kata Kunci: Sistem informasi *E-Government*, Transparansi, Akuntabilitas



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat seiring dengan era globalisasi memberikan dampak yang sangat besar, khususnya dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Salah satu dampak positifnya adalah munculnya konsep *E-government* atau pemerintahan berbasis elektronik. *E-government* memanfaatkan teknologi digital untuk menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan efisiensi, serta memperbaiki akses layanan publik. Penerapan sistem *E-government* ini diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, khususnya di tingkat pemerintahan daerah, dengan memungkinkan pemerintah untuk lebih terbuka dalam mengelola data dan informasi keuangan serta meningkatkan pertanggung jawaban dalam penggunaan anggaran daerah.

Menurut "Survei *E-Government* PBB tahun 2022", lebih dari 60% negara anggota PBB telah meningkatkan penerapan *E-government* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih nyaman, transparan, dan akuntabel. Di Indonesia, *E-government* telah diadopsi melalui berbagai inisiatif, seperti Sistem *E-government* (SPBE) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal transparansi dan pengelolaan keuangan daerah (United Nations, 2022). Pemerintah Indonesia mengambil berbagai kebijakan yang

tertuang dalam UU No.1. Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berupaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel ((Risya Nurindahsari & Trisyanto, 2022)).

Penerapan *E-government* di Indonesia sudah ada sebelum diundangkannya Inpres No.1. Nomor 3 Tahun 2003, untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan jaringan telepon. Pemerintah menyadari manfaat penerapan tata pemerintahan yang baik, yaitu membuka cakrawala baru dalam hal keterbukaan, daya tanggap pemerintah, dan akuntabilitas pemerintah. Di Indonesia, inisiatif implementasi *E-government* diluncurkan pada tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No.11. 6 Tentang telematika (telekomunikasi, media dan informasi).

Di Indonesia, jumlah kasus korupsi yang dilaporkan untuk diinvestigasi meningkat signifikan setiap tahunnya. ICW (2015), mencatat dari 560 kasus korupsi ditahun 2013. Menjadi 629 kasus ditahun (2014). Dari sisi pelaku ditemukan jumlah kepala daerah yang terjerat kasus dan juga terjadi peningkatan dari 310 kepala daerah ditahun 2013, meningkat menjadi 343 kepala daerah ditahun 2014 ICW (2015). Ini artinya korupsi di Indonesia masih merupakan permasalahan serius yang sampai sekarang belum bisa tangani. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga peradilan. Selain itu, pemerintah juga telah memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan membangun *electronic government* untuk pelayanan publik. Tujuan implementasi *E-government*, yaitu untuk mengurangi kondisi asimetri informasi antara agen dan prinsipal (Elbahnasawy, 2014) agar tindakan korupsi yang dilakukan dapat dikurangi bahkan dieliminasi (Kim et al., 2009). Masyarakat sebagai mayoritas pemangku kepentingan pemerintah mengharapkan agar mereka dapat merasakan hasil kinerjanya. Oleh karena itu, aparat pemerintah perlu menerapkan tata kelola yang baik agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Satu hal yang diinginkan masyarakat adalah pemerintahan yang demokratis. Hal ini memerlukan akuntabilitas dan transparansi dalam keterbukaan lebih banyak informasi anggaran keuangan, termasuk kegiatan yang dilakukan pemerintah. Dengan menerapkan sistem *E-government*, masyarakat dapat memantau kegiatan pemerintah yang direncanakan dan dilaksanakan, sehingga meningkatkan kinerja pemerintah. Pemanfaatan *E-government* sendiri dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja aparat pemerintah, derasnya arus informasi dan hadirnya media yang memenuhi seluruh aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menerbitkan sebuah pedoman *good public governance* Indonesia yang menjelaskan bahwa terdapat lima asas yang dapat diterapkan oleh pemerintah yaitu transparansi, demokrasi, akuntabilitas, budaya hukum, kewajaran dan kesetaraan. Dari kelima asas tersebut transparansi dan akuntabilitas mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*), penyediaan informasi memadai yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan (Wilopo, 2017).

Keterbukaan informasi dan pengungkapan penting dilakukan oleh pemerintah untuk menarik kepercayaan dari pemangku kepentingan. Selain itu dengan pengungkapan dan keterbukaan informasi maka akan meminimalisir tindakan korupsi. Pada tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengeluarkan instruksi yang mewajibkan pemerintah daerah memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan melalui sistem *E-budgeting* dan *E-planning*. Tujuannya adalah memastikan setiap proses anggaran dicatat secara elektronik sehingga meminimalkan peluang korupsi dan memudahkan masyarakat memantau penggunaan anggaran di daerahnya masing-masing (Kementerian Dalam Negeri, 2021).

Dalam pengelolaan keuangan, transparansi mengacu pada keterbukaan informasi tentang proses dan hasil pengelolaan anggaran. Ini termasuk publikasi laporan keuangan, informasi tentang anggaran, dan bagaimana dana publik digunakan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan benar. Sehingga menunjukkan bahwa negara yang menerapkan transparansi keuangan cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Sebaliknya, pemerintah harus bertanggung jawab atas penggunaan dana publik.

Akuntabilitas mencakup laporan yang akurat dan tepat waktu tentang pengeluaran dan hasil. Akuntabilitas juga mencakup mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Transparansi juga meningkatkan akuntabilitas dan integritas

lembaga publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, (Nisak et al., 2023).

Transparansi merupakan salah satu target utama yang ingin dicapai dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3a, disebutkan bahwa tujuan dari UU KIP ini adalah untuk menjamin hak warga negara dalam mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini berdampak pada terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, UU KIP juga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang lebih baik. Keterbukaan informasi publik sejalan dengan salah satu pilar reformasi, yaitu transparansi di tingkat pusat dan daerah.

Penerapan keterbukaan informasi publik oleh pemerintah Indonesia mengikuti langkah pemerintah Jepang yang pertama kali menerapkannya pada 1 April 2001 (Sutrisno, 2009: 12). UU Keterbukaan Informasi Publik disahkan dengan tujuan memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui kinerja lembaga publik, dan juga mengandung makna partisipasi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis. Prinsip dasar dari UU KIP adalah kebebasan mengakses informasi publik dengan pengecualian yang tegas dan terbatas (Teks Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 2 tentang Akses Terhadap Informasi Publik).

Dalam jurnal ISEAS berjudul *Public Sector Reforms and Financial Transparency: Experiences from Indonesian District* (Stein dkk, 2009: 65) menyatakan bahwa, “transparansi seharusnya dapat meningkatkan sistem tata kelola, namun dokumen negara tetap bersifat rahasia, keinginan politik untuk menerapkan Undang-Undang Kebebasan Informasi masih kurang, dan pemerintah di berbagai tingkatan menunjukkan sedikit minat serta kemampuan dalam penganggaran berbasis kinerja”.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* yang menjadi landasan untuk penerapan *E-government* di Indonesia. Instruksi ini menguraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh setiap lembaga pemerintah dalam mengembangkan *E-government* sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional. Tujuan dari kebijakan ini adalah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Untuk mendukung pengembangan *E-government* di seluruh Indonesia, Instruksi No. 3 Tahun 2003 mewajibkan gubernur, bupati, dan walikota untuk mengambil tindakan nyata sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan mereka masing-masing. Setiap daerah diharapkan membuat rencana aksi khusus dalam mengimplementasikan

kebijakan ini, sehingga kebijakan dan strategi nasional dapat selaras dengan rencana aksi di tingkat pemerintah daerah.

Salah satu dampak positif dari penerapan *E-government* adalah terciptanya transparansi informasi publik, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, *E-government* juga membuka peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Dalam konteks ini, penerapan *E-government* sangat relevan dalam mendukung upaya pencegahan korupsi dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Inpres No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Meskipun penerapan *E-government* memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaannya di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini meliputi kesenjangan infrastruktur teknologi antara daerah maju dan daerah tertinggal, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan sistem *E-government*, serta resistensi terhadap perubahan di dalam birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai bagaimana *E-government* dapat berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di tingkat pemerintahan daerah di Indonesia. Penerapan *E-government* terbukti dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. keterbukaan informasi keuangan melalui *E-government* mendorong

masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. Kecamatan Wawo di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menjadi contoh bagaimana penerapan *E-government* dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel. Kecamatan Wawo telah mulai mengadopsi sistem digital dalam pelaporan keuangan dan perencanaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana penerapan *E-government* di Kecamatan Wawo berdampak pada transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah serta mengevaluasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi *E-government*.

Daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang sering kali masih memiliki keterbatasan akses jaringan internet dan perangkat pendukung lainnya. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam mengelola sistem *E-government* menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Tantangan ini juga dirasakan di Kecamatan Wawo, yang masih menghadapi kendala infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung penerapan *E-government* secara optimal. Alasan saya memilih penelitian di NTB, khususnya di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan *E-government* terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di pemerintahan daerah. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai sejauh mana teknologi informasi mampu memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya di Indonesia. Hasil penelitian

ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai dampak *E-government* dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di tingkat daerah, serta memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan implementasi *E-government* yang lebih optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *E-government* terhadap transparansi dalam pengelolaan keuangan publik?
2. Bagaimana Pengaruh *E-government* terhadap akuntabilitas keuangan publik?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan untuk membahas topik ini lebih lanjut untuk memahami lebih lanjut tentang:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh *E-government* dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *E-government* terhadap akuntabilitas keuangan publik.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dengan menambah literatur mengenai *E-government* dalam konteks pengelolaan keuangan daerah dan mendukung teori *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Selain itu, memperkaya pemahaman tentang bagaimana teknologi informasi dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong keterbukaan informasi dan partisipasi Masyarakat.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat dengan memberikan pengetahuan terkait akuntabilitas dan transparansi di pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat membantu untuk pengawasan kinerja pemerintah sehingga terciptanya *Good Governance* dan juga berkurangnya praktik korupsi di pemerintahan.

b. Bagi pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah guna perbaikan agar pemerintah dapat mengetahui penerapan *E-government* yang mendukung terciptanya akuntabilitas dan transparansi sehingga perbaikan itu dapat meningkatkan kinerja pemerintah dengan menjadikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta dapat

mengurangi praktik-praktik korupsi yang saat ini marak terjadi di pemerintahan daerah.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian statistik yang dilakukan terkait Pengaruh Sistem Informasi *E-government* terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik di Pemerintah Daerah (studi Kecamatan Wawo NTB BIMA) menghasilkan simpulan yang di dasarkan pada analisis bahwa:

1. Sistem Informasi *E-government* berpengaruh positif terhadap Transparansi.
2. Sistem Informasi *E-government* berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas.

5.2 Keterbatasan

Pada penelitian ini, peneliti telah melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur ilmiah, namun penelitian ini masih memiliki keterbatasan, seperti:

1. Keterbatasan responden penelitian sehingga hasil yang didapatkan mencerminkan kelompok kecil dan tidak dapat menggeneralisasikan temuan ke populasi yang besar.
2. Keterbatasan variabel penelitian karena dalam penelitian ini hanya meneliti hubungan antara variabel *E-government*, Transparansi, dan Akuntabilitas.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu memperluas jumlah dan cakupan responden agar lebih representatif terhadap populasi yang lebih besar.

2. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain yang mungkin memengaruhi hubungan antara *E-Government*, Transparansi, dan Akuntabilitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2014). Tata Kelola Website pada Instansi Pemerintah. Bengkulu.
- Ardielli, E. (2016). Public Administration Transparency in E - government at Local Level of Czech Government 2 . Research Methods and Data. 2(8), 24–33. <https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.28.1003>.
- Ari, D. P. S., & Hanum, L. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Website Djp Terhadap Kepuasan Pengguna Dengan Modifikasi E Govqual. Profit: Jurnal Administrasi Bisnis, 15(1), 104-111.
- Bertot, John C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. Government Information Quarterly, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuijsen, S. G. (2017). 25 Years of Transparency Research: Evidence and Future Directions. Public Administration Review, 77(1), 32–44. <https://doi.org/10.1111/puar.12685>
- Eisenhardt, & M., K. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. The Academy of Management Review, 14(1), 57-74.
- Effendi, H. (2019). Peran e-government dalam pelayanan publik: Studi kasus di pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 10(2), 56-67.
- Grimmelikhuijsen, S. (2012). Linking transparency, knowledge and citizen trust in government: an experiment. International Review of Administrative Sciences, 78(1), 50–73. <https://doi.org/10.1177/0020852311429667>
- Gupta, B., Dasgupta, S., & Gupta, A. (2008). Adoption of ICT in a government organization in a developing country: An empirical study. Journal of Strategic Information Systems, 17(2), 140–154. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2007.12.004>
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, I. (2020). E-government dan tata kelola pemerintahan yang baik: Analisis kebijakan di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik, 11(4), 23-33.
- Indrajit, R. E. (2016). Konsep dan Strategi Electronic Government. Electronic Government, 84.
- Indoensia, R. (2008). Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang (UU), No 14.
- Indonesia, R. (2005). Sistem Informasi Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah (PP), NO 56.

- Iyer, L. S., & Rao RN, S. (2016). Transforming Government : People , Process and Policy Article information
- JENSEN, M. C., & Mecking, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure . Journal of Financial Economics 3, 3(4), 305-360.
- Kurniasih, Y., & Wismaningtyas, T. A. (2020). Smart City Kota Magelang : Perubahan Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Penerapan Electronic Governance. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 8(2), 356.
- López-lópez, V., Iglesias-antelo, S., Vázquezsanmartín, A., Connolly, R., & Bannister, F. (2018). e-government , Transparency & Reputation : An Empirical Study of Spanish Local Government e-government , Transparency & Reputation : An Empirical Study of Spanish Local. Information Systems.
- Mardiasmo. (2018). "Akuntansi Sektor Publik." Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol. 2, No. 1, Mei 2006.
- Mardiasmo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : ANDI
- Mariono, S. (2019). Penerapan E- Government Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- Meijer, A. (2013). Understanding the Complex Dynamics of Transparency. 73, 429–439. <https://doi.org/10.1111/puar.12032>. Understand ing.
- Navitasari, A. D. (2019), Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Penerapan Anggaran Dana Desa.
- Parawu, H. E. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Electronic Government Guna Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Badan Usaha Milik Negara. Journal Publicuho, 3(3), 311.
- Pusida, A., J.Rayes, J., & MAMBO, R. (2021).Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Administrasi Publik, 7(62–65), 58–68.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government.
- Risya Nurindahsari, & Trisyanto, R. (2022).Pengaruh Penerapan Sistem Informasi E-Government terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 251–257. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4128>.

Sugiyono.2019.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta Bandung.

Surasa, S. (2019). Tata kelola pemerintahan berbasis e-government. *Jurnal Ilmiah Multipedia Dan Komunikasi*, 4(1), 11–22.

Syamsul, & Siti Zuhroh. (2021). Implementasi E-Government : Dampaknya Pada Transparansi. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 1–10.

Syamsul (2020) 'POTRET TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (TPKD) DI INDONESIA', *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), pp. 185–204. doi: <http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7105>.

Wilopo, I. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas &Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 61. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).61-78](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).61-78).

